

**MADRASAH SEBAGAI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
(Sistem dan Perkembangannya Sebelum dan Sesudah Kemerdekaan)**

Rahmat
Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar
rahmatsoi243@yahoo.co.id

Abstract

Madrasah is an alternative educational institution for the parents to be the venue for the education of her son. The number of madrasah from one period to the next government has developed. Therefore, policy makers and others involved in the educational process at the school should pay attention to the learning system as the early history of its formation.

The Growth madrasah in Indonesia against the backdrop of two factors; First, factors renewal of Islamic thought which responded by breathing santri who studied in the Middle East. The second is response to the Dutch government's education policy. The development of madrasah before and after independence is determined policy authorities. Before independence policies adopted by the colonial government towards education oriented to strengthening the rule of Islam in Indonesia. After independence, the Indonesian government to lay the madrasah education with a number of regulations and legislation

Keywords: Madrasah, Islamic education, development.

A. Pendahuluan

Dalam wacana Islam, eksistensi pendidikan Islam telah ada sejak kedatangan Islam di Nusantara. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai lembaga pendidikan dengan mengambil nama sesuai dengan penamaan wilayah tempat berdirinya, seperti surau di Sumatera, Meunasas di Aceh, langgar dan pesantren di Jawa. Berdirinya lembaga-lembaga pendidikan itu dilatarbelakangi keinginan untuk mengajarkan dan mendakwahkan ajaran Islam.

Kemudian perkembangan pendidikan Islam di nusantara seiring dengan situasi dan kondisi sosial politik. Kondisi sosial politik ditandai dengan munculnya

kerajaan-keajaan Islam di berbagai wilayah tanah air kemudian disusul datangnya pihak penjajah Barat terutama Belanda kemudian datang Jepang.

Kedatangan penjajah mengakibatkan terjadinya perubahan peta pendidikan di Nusantara. Perubahan mendasar yang tampak adalah terjadinya dualisme pendidikan atau terjadi dikotomi pendidikan, ilmu-ilmu agama Islam hanya dipelajari di lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan oleh pioner Islam, terutama di pesantren. Ilmu-ilmu umum hanya dipelajari di sekolah-sekolah bentukan Belanda. Kondisi pendidikan seperti ini melanda umat Islam Indonesia. Hal demikian memotivasi kalangan pembaharu atau pemikir Islam nusantara untuk mendirikan lembaga pendidikan yang mempertemukan dua kutub yang berbeda yang disebut madrasah.¹

Madrasah merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam terpenting di Indonesia. Keberadaannya begitu penting dalam menciptakan kader-kader bangsa yang berwawasan keislaman. Salah satu kelebihan yang dimiliki madrasah adalah adanya integrasi ilmu umum dan ilmu agama. Madrasah juga merupakan bagian penting dari lembaga pendidikan nasional di Indonesia. Peranannya begitu besar dalam menghasilkan generasi penerus bangsa. Perjuangan untuk mendapatkan pengakuan ini tidak didapatkan dengan mudah. Eksistensi dalam sejarah perjalanannya kurang diperhatikan bila dibandingkan dengan sekolah-sekolah umum. Madrasah seolah hanya menjadi pelengkap keberadaan lembaga pendidikan nasional.

Dalam sejarah perkembangannya, madrasah yang tadinya hanya dipandang sebelah mata, secara perlahan-lahan telah berhasil mendapat perhatian dari masyarakat. Apresiasi ini menjadi modal besar bagi madrasah untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa. Dalam konteks kekinian, sekarang ini banyak madrasah yang menawarkan konsep pendidikan modern.

Melihat kenyataan sejarah, kita tentunya bangga dengan sistem dan lembaga pendidikan Islam madrasah yang ada di Indonesia. Apalagi dengan metode dan kurikulum pelajarannya yang sudah mengadaptasi sistem pendidikan serta kurikulum pelajaran umum. Peran dan kontribusi madrasah yang begitu besar, pada gilirannya sangat terkait dengan peran Departemen Agama. Lembaga inilah yang secara intensif memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia. Oleh karena itu penting diungkapkan sejarah pertumbuhan dan perkembangan lembaga pendidikan ini.

Lembaga pendidikan tidaklah tumbuh dengan serta merta dengan sendirinya, tetapi melalui proses sebagaimana terjadi dalam pertumbuhan lembaga lainnya, dan tidak muncul atau berhenti pada satu patokan tahun, tetapi biasanya mengandung proses awal dan akhir yang menyebar dalam jarak waktu yang relatif panjang.²

¹Perkataan madrasah berasal dari bahasa Arab yang artinya tempat belajar. Padanan madrasah dalam bahasa Indonesia adalah sekolah, lebih dikhususkan lagi sekolah-sekolah agama Islam. Dari sini dapat dipahami bahwa madrasah tersebut adalah penekanannya sebagai suatu lembaga yang mengajarkan ilmu-ilmu keislaman. Perkataan madrasah di tanah Arab ditujukan untuk semua sekolah secara umum. Di Indonesia ditujukan buat sekolah-sekolah yang mempelajari ajaran-ajaran Islam. Ridwan Nasir, *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal* (Cet. I; Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2005), h. 90.

²Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1990-1942* (Cet. VI; Jakarta: LP3ES, 1994), h. xi.

Demikian pula halnya madrasah, bila dilihat pada awal pertumbuhannya dimotivasi oleh keadaan dan situasi tertentu yang mengkondisikannya serta dimotori oleh seseorang atau organisasi tertentu. Pada perkembangan selanjutnya dibina oleh pemerintah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dikemukakan permasalahan pokok yaitu: “Bagaimana sistem dan perkembangan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam ?” Dalam rangka membahas permasalahan pokok tersebut, maka perlu dikemukakan bagaimana latar belakang munculnya madrasah, Bagaimana kondisi madrasah pada masa pertumbuhannya, dan bagaimana perkembangan madrasah, baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka tulisan ini bertujuan mendeskripsikan sejarah madrasah pada masa awal pembentukan dan perkembangannya. Di samping itu tulisan ini diharapkan berguna untuk memahami lebih lanjut perkembangan madrasah di tanah air.

B. Latar Belakang Munculnya Madrasah

Kata Madrasah sebagai salah satu nama lembaga pendidikan Islam, tidak diketahui secara pasti sejak kapan madrasah sebagai istilah – sebutan – untuk satu jenis pendidikan Islam digunakan di Indonesia. Untuk menelusuri hal ini diperlukan penelitian dan studi khusus yang lebih serius. Namun demikian, madrasah sebagai satu sistem pendidikan Islam berkelas dan mengajarkan sekaligus ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum sudah tanpak sejak awal abad ke-20.³

Meskipun belum menemukan kata sepakat, mayoritas peneliti lembaga pendidikan Islam di Indonesia pada umumnya berpandangan bahwa menyerupakan antara madrasah yang berkembang di Timur Tengah pada abad ke-11-12 M dengan madrasah yang berkembang di Indonesia adalah sesuatu yang tidak pada tempatnya. Kalaupun mau dihubungkan, hal itu lebih tepat bila dikaitkan dengan pesantren. Pasalnya, bila diukur dari ketentuan fisik, ditemukan kesamaan di antara keduanya, yaitu sama-sama terdiri dari mesjid, asrama, dan ruang belajar. Adapun kurikulum yang bersifat baku yang mengatur pelaksanaan pendidikan, sebagai prasyarat bagi sebuah madrasah dalam pengertian sekolah belum ditemukan.⁴ Sampai saat ini dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam di Indonesia atau sistem madrasah berakar dari pesantren.

Dalam literatur-literatur sejarah pendidikan Islam di Indonesia tidak ditemukan keterangan yang menginformasikan adanya lembaga pendidikan yang disebut madrasah pada masa-masa awal penyebaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Pada umumnya, literatur-literatur tersebut hanya menginformasikan bahwa

³Maksum, *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya* (Cet. II; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 97.

⁴Ainurrafiq Dawan dan Ahmad Ta’arifin, *Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren* (Cet.I; Sapeen: Listafariska Putra, 2004), h. 34.

evolusi kelembagaan pendidikan di Indonesia bermula dari pesantren dengan bahasa yang lain (surau, meunasa dan langgar), madrasah dan sekolah.

Terlepas dari semua itu, madrasah dianggap fenomena modern untuk pendidikan Islam Indonesia. Penyebutan sebagai fenomena moderen tidak hanya karena penggunaan sistem baru, tetapi juga akibat pertumbuhannya yang dimotifasi dua faktor penting.

1. Faktor pembaharuan Islam

Pembaharuan sistem pendidikan Islam di Indonesia diawali dengan adanya santri-santri Indonesia belajar di Hijaz dan Mesir, seperti Syaikh Ahmad Katib, Syaikh Nawawi Banten dan Syaikh Arsyad al-Banjari. Mereka bermukim di sana bertahun-tahun.⁵ Kemudian mereka kembali ke tanah air, lalu mereka mengajarkan ilmunya kepada santri-santri di Indonesia dan tidak sedikit di antara mereka mendirikan lembaga pendidikan yang bernuansa baru.

Dalam tradisi pendidikan Islam di Indonesia, kehadiran dan perkembangan madrasah sangat terkait dengan gerakan pembaharuan Islam yang diawali oleh usaha sejumlah tokoh intelektual agama Islam dan kemudian dikembangkan oleh organisasi-organisasi Islam. Bagi kalangan pembaharu, pendidikan agaknya senantiasa dipandang sebagai aspek strategi dalam membentuk pandangan keislaman masyarakat. Dalam kenyataan, pendidikan yang terlalu berorientasi pada ilmu-ilmu agama, agaknya kurang memberi perhatian kepada masalah-masalah sosial, politik, ekonomi dan budaya. Karena itu, untuk melakukan pembaharuan terhadap pandangan dan tindakan masyarakat itu, langka strategis yang harus ditempuh adalah memeperbaharui sistem pendidikan.⁶

Dari sudut pandang ide secara umum, gerakan pembaharuan Islam di Indonesia agaknya dipengaruhi secara kuat oleh pemikiran dan usaha tokoh-tokoh pembaharu Timur Tengah pada akhir abad ke-19, khususnya Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh. Kedua tokoh ini dipandang sangat penting dalam menyyalakan api pembaharuan di seluruh dunia Islam. Dalam hal ini, keduanya memberi dukungan kepada umat Islam untuk mempelajari ilmu pengetahuan yang lebih luas, dan menyerukan penataan sistem kelembagaan sosial, politik, ekonomi dan termasuk pendidikan.⁷

Dari sudut pandang ide secara khusus, gerakan pembaharuan Islam di Indonesia pada awa abad ke-20 dilatarbelakangi oleh kasadaran yang kompleks sebagaimana diuraikan oleh Ahmad Mansur Suryanegara dengan mengidentifikasi adanya tiga faktor yang mendorong gerakan pembaharuan Islam di Indonesia, *pertama*, terbentuknya kesatuan agama bangsa Indonesia. Agama Islam dianut 90 persen penduduk. Kesamaan keykinan ini menjadi dasar untuk menata aspek-aspek Islam yag berdasarkan pada sumber ajaran Islam. *Kedua*, Islam tidak hanya sebagai agama yang mengajarkan perlunya membangun jemaah, tetapi Islam juga sebagai simbol perlawanan terhadap penjajahan Belanda yang melancarkan politik

⁵Musrifah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia* (Cet. I; Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2007) h. 121.

⁶Maksum, *op. cit.*, h. 83.

⁷*Ibid.*, h. 85-86.

kristenisasi. *Ketiga*, Adanya upaya Belanda melestarikan penjajahannya dengan menciptakan rasa rendah diri umat Islam Indonesia.⁸

Bagi tokoh-tokoh pembaharuan di Indonesia, pendidikan kiranya senantiasa dianggap sebagai aspek yang strategis untuk membentuk sikap dan pandangan keislaman masyarakat. Oleh karena itu, terbentuknya madrasah tidak bisa lepas dari gerakan pembaharuan Islam yang dimulai oleh usaha beberapa orang tokoh intelektual agama Islam yang selanjutnya dikembangkan oleh organisasi-organisasi.

2. Respons terhadap politik pendidikan pemerintah Belanda

Di masa pemerintahan Belanda, keinginan untuk mengkristenkan penduduk pribumi semakin mewarnai kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Kegiatan Zending (Protestan) dan Misionaris (Katolik) yang telah berjaya di masa Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) dan semakin leluasa menancapkan kukunya di tanah air. Bagi Belanda, pendidikan merupakan saluran melakukan kegiatan kristenisasi. Sekolah-sekolah yang dibentuk bertujuan untuk menegakkan dan menyebarkan agama Kristen dan sekolah-sekolah Kristen menjadi alat penguasa.⁹

Sebagai perpanjangan tangan pemerintah di Amsterdam, VOC mendirikan beberapa sekolah di Indonesia, seperti tahun 1607 di Ambon yang kemudian pada tahun 1627 jumlahnya berkembang menjadi 16 buah, dan 18 buah di pulau-pulau sekitar Ambon. Di Timur didirikan sekolah pada tahun 1701. Di pulau Jawa, yaitu di Batavia didirikan sekolah pada tahun 1617, bahkan antara tahun 1849-1852 didirikan pula 20 sekolah yang berlokasi pada wilayah kerisidenan¹⁰ Melalui sekolah-sekolah itu, Belanda menanamkan pengaruhnya di daerah jajahannya.

Pada perkembangan selanjutnya, pada awal abad ke-20 atas perintah Gubernur Jenderal Van Heutsz sistem pendidikan diperluas dalam bentuk sekolah desa, walaupun masih diperuntukkan terbatas bagi kalangan anak-anak bangsawan. Pada masa selanjutnya, sekolah ini dibuka secara luas untuk rakyat umum dengan biaya yang murah.¹¹

Dengan terbukanya kesempatan yang luas bagi masyarakat umum untuk memasuki sekolah-sekolah yang diselenggarakan secara tradisional oleh kalangan Islam mendapat tantangan dan saingan, terutama karena sekolah-sekolah pemerintah Belanda dilaksanakan dan dikelola secara modern terutama dalam hal kelembagaan, kurikulum, metodologi, sarana dan lain-lain. Perkembangan sekolah yang demikian merakyat menyebabkan tumbuhnya ide-ide di kalangan intelektual Islam untuk memberikan respons dan jawaban terhadap tantangan tersebut, dengan tujuan untuk

⁸Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah* (Cet. II; Salamadani Pustaka Semesta: Bandung, 2009), h. 335-336.

⁹Marwan Saridjo, *Pendidikan Islam dari Masa ke Masa* (Cet. I; Jakarta: Yayasan Ngali Aksara, 2010), h. 50-51.

¹⁰Abuddin Nata, ed., *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-lembaga Pendidikan Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Grasindo, 2001), h.197

¹¹*Ibid.*, h. 198.

memajukan pendidikan Islam.¹² Dari sinilah muncul ide di kalangan intelektual Islam mempertemukan dua kutub lembaga pendidikan yang berbeda tersebut, dengan mendirikan lembaga pendidikan Islam yang disebut madrasah.

C. Madrasah pada Masa Pertumbuhan

Sejak penjajahan sampai awal abad ke-20 M, pendidikan di Indonesia terpecah menjadi dua bagian, yaitu: *pertama*, pendidikan diberikan oleh sekolah Barat yang sekuler dan tak mengenal agama, dan *kedua*, pendidikan yang diberikan oleh pondok pesantren yang hanya mengenal agama saja. Hasil penelitian Steenbrink menunjukkan adanya perbedaan yang mencolok antara pendidikan kolonial dengan pesantren, bukan saja dari segi metode, tetapi juga dari segi isi dan tujuannya. Jika pendidikan kolonial Belanda lebih terpusat pada pengetahuan dan keterampilan duniawi (pendidikan umum), pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam, lebih menekankan pada pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi penghayatan agama.¹³

Terpecahnya dunia pendidikan menjadi dua corak yang sangat berbeda dan bahkan bertentangan seperti ini, tentu tidak akan menguntungkan perkembangan intelektual masyarakat Indonesia. Sadar akan hal ini, beberapa intelektual muslim berupaya melakukan inovasi penyelenggaraan pendidikan dengan cara mendirikan lembaga pendidikan yang mengajarkan selain ilmu-ilmu pengetahuan agama juga ilmu-ilmu pengetahuan umum.

Dari uraian ini, dapat dikatakan bahwa di samping kedua corak pendidikan tersebut, pada perkembangan selanjutnya, terdapat corak pendidikan ketiga yang dianggap sebagai sintesa kedua corak tersebut. Artinya terdapat lembaga pendidikan yang didirikan untuk mengembangkan ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Pada saat inilah mulai dikenal secara luas penggunaan istilah madrasah.

Madrasah yang mula-mula merintis langkah pengintegrasian ini adalah Madrasah Adabiyah yang didirikan oleh Syekh Abdullah Ahmad pada tahun 1909 M di Padang Panjang Sumatera Barat. Madrasah ini menerapkan model dan sistem persekolahan Barat dengan menambahkan muatan kurikulum ilmu-ilmu umum. Rintisan yang dilakukan madrasah ini menandai langkah awal pengintegrasian pendidikan Islam ke dalam persekolahan umum.¹⁴

Menurut Muhammad Yunus yang dikutip oleh Ainurrafiq Dawan dan Ahmad Ta'arifin, madrasah ini, meski pada waktu tertentu merupakan sekolah Belanda, tetapi dapat dikatakan lembaga pendidikan Islam pertama di Indonesia yang memakai sistem klasikal, lengkap dengan bangku, meja, dan papan tulis.¹⁵

Madrasah Adabiyah selain memberikan pelajaran agama juga memberikan pelajaran membaca dan menulis huruf latin dan ilmu hitung. Pada tahun 1915

¹²Samsul Nizar, ed., *Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah sampai Indonesia* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2011), h. 292.

¹³Ainurrafiq Dawan dan Ahmad Ta'arifin, *op. cit.*, h. 37.

¹⁴Nurhayati Djamas, *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pascakemerdekaan* (Cet. I; Raja Grafindo Persada, 2009), h. 121.

¹⁵Ainurrafiq Dawan dan Ahmad Ta'arifin, *op. cit.*, h. 39.

madrasah ini mendapat pengakuan dari pemerintah Belanda dan berubah menjadi Hollands Inlandsche School (HIS), yaitu singkatan sekolah dasar. Ini merupakan HIS pertama yang didirikan oleh organisasi Islam dan merupakan HIS pertama di Minangkabau yang memasukkan agama di dalam rencana pelajarannya.¹⁶

Para penulis sejarah pendidikan Islam di Indonesia sepakat dalam menyebut beberapa madrasah selain madrasah Adabiyah tersebut pada periode pertumbuhannya sebagai madrasah yang dianggap pelopor dan perintis. Madrasah-madrasah yang didirikan tersebut adalah: (1) Madras School didirikan pada tahun 1910 oleh M. Thalib Umar di Sungayang Batusangkar Sumatera Barat. (2) Madrasah Diniyah didirikan pada tanggal 10 Oktober 1915 oleh Zainuddin Labai L. Yunusiy di Padang Panjang Sumatera Barat. (3) Madrasah Muhammadiyah diperkirakan berdiri pada tahun 1918 oleh Ahmad Dahlan di Yogyakarta. (4) Arabiyah School didirikan pada tahun 1918 oleh Syekh Abbas di Ladang Lawas. (5) Sumatera Thawalib secara formal membuka madrasah di Padang Panjang Sumatera Barat pada tahun 1921 di bawah pimpinan Syekh Abdul Karim Amrullah. (6) Madrasah Diniyah Putri didirikan oleh Rangkayo Rahman L Yunusiy di Padang Panjang. (7) Madrasah Salafiyah didirikan oleh Hasyim Asy'ri pada tahun 1916 di Tebuireng. Selanjutnya, madrasah ini berkembang dengan bermacam jenjang dan jenis di bawah naungan Nadlhatul Ulama yang didirikan pada tanggal 31 Januari 1921.¹⁷

Di samping madrasah-madrasah yang merupakan madrasah pelopor dan perintis dalam pendirian madrasah di Indonesia tersebut, berikut ini disebutkan madrasah-madrasah di daerah lainnya yang mengikuti jejak pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia, baik sebagai lembaga yang baru berdiri langsung dengan pola madrasah maupun yang semula berdiri belum mengikuti pola pembaharuan madrasah. Madrasah-madrasah yang dimaksud muncul di berbagai wilayah Indonesia.

Di Aceh, berdiri Madrasah Sa'dah Abadiyah di Sigli (1930 M) oleh Tengkuh Daud Beureuh, Madrasah al-Muslim di Bieruen (1930 M), Madrasah Darul Huda (1934 M), Normal Islam (1939 M) dan Madrasah Jadam dan Mahad Iskandar Muda di Lampaku (1940 M); di Sumatra Timur berdiri Madrasah Masrurah (1912 M) dan Madrasah Azizah (1918 M); di Medan, berdiri al Jamiatul Washliyah (1930 M); di Tapanuli, berdiri Madrasah Mustafawiah Purbabaru (1934); di Jambi, berdiri Madrasah Nurul Islam (1934 M), Madrasah Jauharain (1940 M) dan Madrasah Nurul Iman (1941 M); di Palembang, berdiri Madrasah al Quraniyah (1920 M), Madrasah Ahliah Diniyah (1920), Madrasah Nurul Falah (1934 M) dan Madrasah Darul Funun (1938); di Jawa Barat, berdiri Madrasah Mathla'ul Anwar di Menes (1916 M), Madrasah Khairul Huda di Banten, Madrasah Masyarikul Anwar dan Madrasah Nurul Falah di Pandeglang, Madrasah Persatuan Umat Islam di Majalengka (1917 M), Madrasah al-Khairiyah di Serang (1925 M), Madrasah Pesantren Gunung Puyuh di Sukabumi, dan Madrasah Persatuan Islam di Bandung (1936); di Yogyakarta, berdiri Madrasah Krapyak; di Jawa Timur, berdiri Madrasah Pesantren Rejoso Peorongan (1927 M) dan Madrasah Pondok Modern Darus Salam Gontor Ponorogo (1926 M); di Sulawesi, berdiri Madrasah Wajo Arabiyah Islamiyah di Wajo (1931 M), Madrasah

¹⁶Deliar Noer, *op. cit.* h. 52. Dan Abuddin Nata (Ed.), *op. cit.*, h.199.

¹⁷Disadur dari *ibid.*, h. 199-201.

Amiriah Islamiyah di Watampone (1933 M), Madrasah al-Khairat di Sulawesi Tengah (1930 M) dan Madrasah Tarbiyah al-Islamiyah di Mangkoso (1938 M); di Kalimantan, berdiri Madrasah al-Najah wal Falah di Sei Bakan Besar Mempawah (1918 M), Madrasah al-Sultaniyah di Sambas (1922 M), Madrasah al-Raudhatul di Pontianak (1936 M) dan Madrasah Normal Islam (1928 M); dan Nusa Tenggara Barat, berdiri Madrasah Nahdlatul Watan di Lombok Timur (1939), Madrasah al-Ittihad di Ampean Lombok Barat dan Madrasah Darul Ulum di Sumbawa.¹⁸

Sejak pertumbuhan, sistem pendidikan madrasah sudah tidak menggunakan sistem pendidikan yang sama dengan sistem pendidikan Islam pesantren. Baik menyangkut sistem belajar mengajar, materi pelajaran, rencana pembelajaran, waktu belajar maupun pengasuh (guru).

Wirjosukarto dalam penelitiannya, dikutip oleh Ainurrafiq Dawam dan Ahmad Ta'arifin menemukan adanya perbedaan antara pesantren dan madrasah, diantaranya: *pertama*, sistem belajar-mengajar. Pesantren menggunakan sistem sorogan dan wetonan, sedangkan madrasah menggunakan sistem klasikal dengan mengadopsi sistem pendidikan Barat. *Kedua*, materi pelajaran. Pesantren hanya berupa pendidikan agama semata, sedangkan madrasah tidak hanya diajarkan materi agama tetapi juga diajarkan ilmu-ilmu umum. *Ketiga*, rencana pembelajaran. Pesantren pada umumnya belum mempunyai rencana pembelajaran yang teratur dan integral, sedangkan dalam madrasah sudah diatur rencana pembelajaran yang tersusun secara sistematis. *Keempat*, waktu belajar. Waktu belajar di Pesantren pada umumnya terlalu bebas dan kurang terpimpin, sedangkan di madrasah semua kegiatan diselenggarakan dengan batas waktu tertentu dan terpimpin. *Kelima*, guru. Pada pesantren guru identik dengan alam pikiran lama, sedangkan madrasah guru identik dengan alam pikiran modern.¹⁹

D. Perkembangan Madrasah Sebelum Kemerdekaan

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, madrasah memulai proses pertumbuhannya atas dasar semangat pembaharuan di kalangan umat Islam. Latar belakang kelahiran madrasah itu bertumpuh pada dua faktor penting. *Pertama*, pendidikan Islam tradisional dianggap kurang sistematis dan kurang memberikan kemampuan pragmatis yang memadai. *Kedua*, laju perkembangan sekolah-sekolah ala Belanda di kalangan masyarakat cenderung meluas dan membawa watak sekularisme sehingga harus diimbangi dengan sistem pendidikan Islam yang memiliki model dan organisasi yang lebih teratur dan terencana. Pertumbuhan madrasah sekaligus menunjukkan adanya pola respon umat Islam yang lebih progresif, tidak semata-mata defensif terhadap politik pendidikan Hindia Belanda. Dengan berbagai variasi sesuai dengan basis pendukungnya, madrasah tumbuh di berbagai lokasi dalam jumlah yang dari waktu ke waktu semakin banyak.

Kebijakan pemerintah Hindia Belanda sendiri terhadap pendidikan Islam pada dasarnya bersifat menekan karena kekuwatiran akan timbulnya militansi kaum

¹⁸Disadur dari *ibid.*, 202-204.

¹⁹Ainurrafiq Dawam dan Ahmad Ta'arifin, *op. cit.*, h.38-39.

muslimin terpelajar. Bagi pemerintahan penjajah, pendidikan di Hindia Belanda tidak hanya bersifat pedagogis kultural, tetapi juga bersifat psikologis politis.²⁰ Di satu pihak, pandangan ini menimbulkan kesadaran bahwa pendidikan dianggap begitu vital dalam upaya mempengaruhi budaya masyarakat. Melalui pendidikan ala Belanda dapat diciptakan kelas masyarakat terdidik yang berbudaya Barat sehingga akan lebih akomodatif terhadap kepentingan penjajah. Di pihak lain, pandangan di atas juga mendorong pengawasan yang berlebihan terhadap perkembangan lembaga pendidikan Islam seperti madrasah. Walaupun pengorganisasian madrasah menerima pengaruh dari sistem Belanda, tetapi muatan keagamaan di lembaga itu pada akhirnya akan menambah semangat kritis umat Islam terhadap sistem kebudayaan yang dibawa oleh kaum penjajah.²¹

Salah satu kebijakan pemerintah Belanda dalam mengawasi pendidikan Islam adalah penerbitan Ordonansi Guru. Kebijakan ini mewajibkan guru-guru agama untuk memiliki surat izin dari pemerintah. Tidak setiap orang, meskipun ahli ilmu agama dapat mengajar di lembaga-lembaga pendidikan. Latar belakang ordonansi guru ini sepenuhnya bersifat politis untuk menekan sedemikian rupa sehingga pendidikan agama tidak menjadi faktor pemicu perlawanan rakyat terhadap penjajah.²²

Ordonansi Guru dinilai umat Islam sebagai kebijakan yang tidak sekedar membatasi perkembangan pendidikan Islam saja, tetapi sekaligus menghapus peran penting Islam di Indonesia. Dalam banyak kasus sering terjadi guru-guru agama dipersalahkan ketika menghadapi gerakan krestenisasi dengan alasan ketertiban dan keamanan.²³

Dalam perkembangannya, Ordonansi Guru itu sendiri mengalami perubahan dari keharusan guru agama mendapatkan surat izin, menjadi keharusan guru agama itu cukup melapor dan memberitahu saja. Ordonansi Guru yang diperbaharui ini diberlakukan secara lebih luas di berbagai wilayah, baik di Jawa maupun luar Jawa. Namun demikian, sebagaimana pernah terjadi sebelumnya, Ordonansi Guru ini pun seringkali disalahgunakan oleh pemerintah lokal untuk menghambat gerakan-gerakan umat Islam.²⁴

Selain Ordonansi Guru, pemerintah Hindia Belanda juga memberlakukan Ordonansi Sekolah Liar. Ketentuan ini mengatur bahwa penyelenggaraan pendidikan harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pemerintah. Laporan-laporan mengenai kurikulum dan keadaan sekolah harus dilaporkan secara berkala. Ketidaktuntutan laporan sering dijadikan alasan untuk menutup kegiatan pendidikan di kalangan

²⁰Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda* (Cet. III; Jakarta: LP3ES, 1996), h. 49.

²¹Maksum, *op. cit.*, h. 114-115.

²²Marwan Saridjo, *op. cit.*, h. 62.

²³Maksum, *loc. cit.*

²⁴*Ibid.*, h. 115-116.

masyarakat tertentu. Karena kebiasaan lembaga pendidikan Islam yang masih belum tertata, ordonansi itu dengan sendirinya menjadi faktor penghambat.²⁵

Reaksi umat Islam terhadap kebijakan pemerintah Hindia Belanda itu dapat dikelompokkan ke dalam dua corak, defensif dan progresif. Corak defensif ditunjukkan dengan menghindari sejauh mungkin pengaruh politik pemerintah Belanda terhadap sistem pendidikan Islam. Sikap ini terlihat dalam sistem pendidikan tradisional pesantren yang sepenuhnya mengambil jarak dengan pemerintahan penjajah.²⁶

Corak responsi umat Islam juga bersifat progresif, yang memandang bahwa tekanan pemerintah Belanda itu merupakan kebijakan diskriminatif. Usaha umat Islam dalam bidang pendidikan adalah bagaimana mencapai kesetaraan dan kesejajaran, baik dari sudut kelembagaan maupun kurikulum. Ketergantungan pada tekanan penjajah justru akan semakin melemahkan posisi umat Islam sendiri. Begitupun sebaliknya, membiarkan sikap defensif terus menerus, akan semakin memberi ruang yang lapang bagi gerakan pendidikan pemerintah Belanda. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan upaya mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan secara mandiri yang produknya sama dengan sekolah ala Belanda, tetapi tidak tercabut dari akar keagamaannya. Wujud konkrit dari upaya ini adalah tumbuh dan berkembangnya madrasah di berbagai wilayah, baik di Jawa maupun di luar Jawa.²⁷

Terlepas dari kedua pola responsi di atas, umat Islam pada umumnya menolak segala bentuk ordonansi yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda. Umat Islam menyatakan keberatan terhadap ordonansi sehingga mereka membuat reaksi cukup keras. Di Minangkabau sebuah pertemuan khusus umat Islam dilaksanakan untuk membahas masalah ini dan berakhir pada keputusan untuk menentangnya.²⁸

Di bawah pengawasan dan ordonansi yang ketat pemerintah Belanda, madrasah mulai tumbuh. Terdapat beberapa madrasah yang memperoleh pengakuan pemerintah meskipun masih merupakan pengakuan yang setengah-setengah. Tetapi pada umumnya madrasah-madrasah itu, baik di Minangkabau, Jawa dan Kalimantan, berdiri semata-mata karena kreasi tokoh dan organisasi tertentu tanpa dukungan dan legitimasi dari pemerintah. Kebutuhan sebagian rakyat untuk mengenyam pendidikan akhirnya terpenuhi melalui madrasah, sementara pemerintah melakukan pembatasan-pembatasan dalam sekolah-sekolah yang didirikannya sebagai wujud dari kebijakan diskriminatifnya.²⁹

Kebijakan yang kurang menguntungkan terhadap pendidikan Islam masih berlanjut pada masa penjajahan Jepang, meskipun terdapat beberapa modifikasi. Walaupun diakui lebih memberikan kebebasan dari pada penjajah Belanda. Kebijakan dasar pemerintah penjajah Jepang berorientasi pada penguatan kekuasaan di

²⁵*Ibid.*, h. 116.

²⁶*Ibid.*

²⁷*Ibid.*, h. 117.

²⁸*Ibid.*

²⁹*Ibid.*, h. 117-118.

Indonesia. Pemerintah Jepang memegang kendali yang sangat ketat dalam program pendidikan di Indonesia, walaupun dalam kenyataannya menghadapi kendala kurangnya tenaga pengajar yang memenuhi kriteria. Untuk memutus hubungan dengan pemerintah Belanda, pemerintah Jepang menghapuskan sekolah-sekolah berbahasa Belanda. Bahasa Indonesia bahkan digunakan secara lebih luas di lingkungan pendidikan. Kurikulum dan struktur pendidikan pun dirubah.³⁰

Untuk memperoleh dukungan dari umat Islam, pemerintah Jepang mengeluarkan kebijakan yang menawarkan bantuan dana bagi madrasah. Berbeda dengan pemerintah Belanda, pemerintah Jepang membiarkan dibukanya kembali madrasah-madrasah yang pernah ditutup pada masa pemerintahan sebelumnya. Hal ini dilakukan karena kenyataan bahwa pengawasan pemerintah Jepang sendiri tidak dapat menjangkau madrasah dan pesantren yang sebagian besar berlokasi di desa-desa terpencil. Namun demikian, pemerintahan Jepang tetap mewaspadaikan bahwa madrasah-madrasah itu memiliki potensi perlawanan yang membahayakan bagi pendudukan Jepang di Indonesia.³¹

Untuk mengamankan kepentingannya, pemerintah Jepang lebih banyak mengangkat kalangan priyayi dalam jabatan-jabatan di Kantor Urusan Agama. Kebijakan seperti itu tentu saja lebih dapat bekerjasama dengan pemerintah Jepang karena tidak memiliki perhatian yang serius terhadap pentingnya gerakan pendidikan Islam di Indonesia. Kantor ini bertugas antara lain memfasilitasi pertemuan dan pembinaan guru-guru agama. Meskipun dengan alasan pembinaan kecakapan, tetapi usaha itu pada dasarnya bertujuan agar pelaksanaan pendidikan Islam, baik di madrasah maupun pesantren tetap dalam kontrol pemerintah.

Respon umat Islam terhadap kebijakan pemerintah Jepang tanpanya lebih progresif. Menghadapi politik pendidikan Jepang, kalangan ulama di Minangkabau bersepakat mendirikan Majelis Islam Tinggi Minangkabau. Majelis ini berusaha mengkoordinasikan pendidikan agama di madrasah. Dalam hal kurikulum, majelis ini membuat rancangan yang menjamin standar mutu pendidikan agama. Pemerintah Jepang memberikan pertimbangan yang cukup serius terhadap setiap rancangan dan usulan dari Majelis Islam Tinggi, khususnya dalam bidang pendidikan.³²

Dilaporkan bahwa pada masa penjajahan Jepang pengembangan madrasah awaliyah digalakkan secara luas. Majelis Islam tinggi menjadi penggerak dan sekaligus penggerak utama untuk berdirinya madrasah-madrasah awaliyah yang diperuntukkan bagi anak-anak berusia minimal 7 tahun. Program pendidikan pada madrasah-madrasah awaliyah itu lebih ditekankan pada pembinaan keagamaan dan diselenggarakan pada sore hari. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan bagi anak-anak yang pada umumnya mengikuti sekolah-sekolah rakyat pada pagi hari. Perkembangan madrasah-madrasah itu ikut mewarnai pola pengorganisasian pendidikan agama yang lebih sistematis.³³

³⁰*Ibid.*

³¹*Ibid.*

³²*Ibid.*, h. 119.

³³*Ibid.*

D. Perkembangan Madrasah Setelah Kemerdekaan

Perkembangan madrasah pada awal kemerdekaan sangat terkait dengan Departemen Agama yang mulai resmi berdiri 3 Januari 1946. Lembaga inilah yang secara intensif memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia.³⁴ Orientasi usaha Departemen Agama dalam bidang pendidikan Islam bertumpu pada aspirasi umat Islam agar pendidikan agama diajarkan di sekolah-sekolah, di samping pada pengembangan madrasah itu sendiri. Secara lebih spesifik, usaha ini ditangani oleh satu bagian khusus yang mengurus masalah pendidikan agama. Dalam salah satu dokumen disebutkan bahwa bagian pendidikan di lingkungan Departemen Agama meliputi: (1) Memberi pengajaran di sekolah negeri dan partikular. (2) Memberi pengetahuan umum di madrasah. (3) Mengadakan pendidikan Guru Agama (PGA) dan Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN).³⁵

Dengan adanya tugas-tugas seperti itu, Departemen Agama dapat dikatakan sebagai representasi umat Islam dalam memperjuangkan penyelenggaraan pendidikan Islam secara lebih meluas di Indonesia. Dalam kaitannya dengan perkembangan madrasah, departemen tersebut menjadi andalan yang secara politis dapat mengangkat posisi madrasah sehingga memperoleh perhatian yang serius di kalangan pemimpin yang mengambil kebijakan. Di samping melanjutkan usaha-usaha yang dirintis oleh sejumlah tokoh pendidikan, Departemen Agama secara lebih tajam mengembangkan program-program perluasan dan peningkatan mutu pendidikan.³⁶

Salah satu gambaran yang cukup menonjol dari perkembangan madrasah pada awal kemerdekaan adalah didirikan dan dikembangkannya Pendidikan Guru Agama (PGA) dan pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN). Kedua madrasah ini menandai perkembangan yang sangat penting di mana madrasah dimaksudkan mencetak tenaga-tenaga yang profesional keagamaan, di samping mempersiapkan tenaga-tenaga yang siap mengembangkan madrasah.³⁷

Sejarah perkembangan PGA bermula dari program Departemen Agama yang ditandatangani oleh Abdullah Sigit sebagai penanggung jawab bagian pendidikan. Pada tahun 1950, bagian itu membuka dua lembaga pendidikan yang dapat dikatakan sebagai madrasah profesional keguruan, yaitu: Sekolah Guru Agama Islam (SGAI). Sekolah ini terdiri dari dua jenjang, jenjang jangka panjang yang ditempuh selama lima tahun dan diperuntukkan bagi siswa tamatan SR/MI, dan jenjang jangka pendek

³⁴Sebelum dibentuk departemen agama pengurusan madrasah telah mulai diperhatikan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) dalam pengumumannya tanggal 22 Desember 1945 (Berita RI tahun II Nomor 4 an 5 halaman 20 kolom 1) yang antara lain menganjurkan: "Dalam memajukan pendidikan dan pengajaran sekurang-kurangnya diusahakan agar pengajaran dilanggar-langgar dan madrasah berjalan terus dan dipercepat", kemudian tanggal 27 Desember 1945 BPKNIP menyarankan agar madrasah dan pondok pesantren mendapat perhatian dan bantuan. Abuddin Nata, *ed.*, *op. cit.*, h. 204.

³⁵Ainurrafiq Dawam dan Ahmad Ta'arifin, *op. cit.*, h. 43.

³⁶*Ibid.*

³⁷*Ibid.*, h. 43-44.

yang hanya ditempu selama dua tahun dan diperuntukkan bagi tamatan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah. Sedangkan lembaga yang kedua, yaitu Sekolah Guru Hakim Agama Islam (SGHAI). Sekolah ini ditempuh selama empat tahun dan diperuntukkan bagi tamatan SMP/Madrasah Tsanawiyah. SGHAI sendiri dibagi dalam empat bagian: Bagian A mencetak guru kesusatraan, bagian B mencetak guru ilmu alam, bagian C mencetak guru agama dan bagian D mencetak tenaga pengadilan agama.³⁸

Kedua model madrasah ini hanya didirikan di beberapa kota di Jawa. Dalam perkembangan kemudian, SGAI berubah menjadi PGA dan SGHAI berubah menjadi SGHA. Dengan perubahan itulah kemudian kedua lembaga tersebut didirikan di sejumlah daerah di luar Jawa.

Ketika Jawatan Pendidikan Agama dipegang oleh Arifin Tamyang, struktur madrasah keguruan ditata ulang karena dianggap terkesan mengurangi eksistensi madrasah tersebut. PGA yang dulu ditempuh cukup dengan lima tahun, dirubah menjadi enam tahun yang terdiri dari tingkat Pertama selama empat tahun dan tingkat Atas selama dua tahun. Kebijakan Arifin juga menegaskan dihapuskannya PGA jangka pendek dua tahun. Sementara itu perubahan drastis juga terjadi pada SGHA. Menurut Maksum, madrasah yang terakhir ini dirubah menjadi PHIN, yang tidak lagi membuka jurusan keguruan. Adapun upaya mencetak guru agama hanya disediakan PGA 6 tahun.³⁹

Salah satu hasil yang cukup menonjol dari pembinaan madrasah pada masa awal kemerdekaan adalah pengembangan yang intensif terhadap madrasah keguruan, baik dalam bentuk PGA maupun SGHA. Adapun variasi kurikulum antar berbagai perkumpulan pada umumnya masih tanpak meskipun sudah mulai diarahkan pada perjenjangan yang sesuai dengan perjenjangan sekolah. Meskipun belum maksimal, namun perkembangan madrasah pada masa awal kemerdekaan memberikan sumbangan yang cukup panjang bagi perkembangan madrasah pada masa berikutnya. Perkembangan jumlah PGA pada tahun 1951 mencapai 25 buah dan pada tahun 1954 mencapai 30 buah.⁴⁰

Sampai pertengahan dekade 60-an, madrasah tersebar di berbagai daerah hampir di seluruh propinsi di Indonesia. Dilaporkan bahwa jumlah madrasah tingkat rendah pada masa itu sudah mencapai 13.057. Laporan yang sama juga menyebutkan bahwa jumlah madrasah tingkat pertama mencapai 776 buah dengan jumlah murid sebanyak 87.932 orang. Adapun jumlah madrasah tingkat Atas diperkirakan mencapai 16 madrasah dengan jumlah murid sebanyak 1.881 orang. Dengan demikian, berdasarkan laporan di atas, jumlah madrasah secara keseluruhan sudah mencapai 13.849 buah dengan jumlah murid sebanyak 2.017.590 orang. Perkembangan ini menunjukkan bahwa sudah sejak awal, pendidikan madrasah memberikan sumbangan yang signifikan bagi proses pencerdasan dan pembinaan akhlak bangsa.⁴¹

³⁸Maksum, *op. cit.*, h. 124.

³⁹*Ibid.*, h. 125.

⁴⁰*Ibid.*, h.126.

⁴¹*Ibid.*

Pada masa awal kemerdekaan, madrasah belum dipandang sebagai bagian dari sistem pendidikan secara nasional, tetapi merupakan lembaga pendidikan otonom di bawah pengawasan Menteri Agama. Hal ini disebabkan karena kenyataan bahwa sistem pendidikan madrasah lebih didominasi oleh muatan-muatan agama, menggunakan kurikulum yang belum terstandar, memiliki struktur yang tidak seragam, dan memberlakukan manajemen yang kurang dapat dikontrol oleh pemerintah. Menghadapi kenyataan ini, maka langkah pertama dalam pembaharuan pendidikan madrasah adalah melakukan formalisasi dan strukturalisasi madrasah. Formalisasi ditempuh dengan menegerikan sejumlah madrasah dengan kriteria tertentu yang diatur oleh pemerintah, di samping mendirikan madrasah-madrasah negeri yang baru. Sedangkan strukturalisasi dilakukan dengan mengatur penjenjangan dan perumusan kurikulum yang cenderung sama dengan penjenjangan dan perumusan kurikulum sekolah-sekolah di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.⁴²

Antara akhir tahun 70-an sampai akhir 80-an, pemerintah mulai memikirkan kemungkinan mengintegrasikan madrasah ke dalam sistem Pendidikan Nasional. Usaha menuju ke arah ini agaknyanya tidak sederhana karena secara konstutisional pendidikan nasional masih diatur oleh UU No. 4 Tahun 1959 jo. No. 12 Tahun 1954 yang terkesan mengabaikan sistem madrasah. Upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah memperkuat struktur madrasah, baik dalam jenjang maupun kurikulumnya sehingga lulusan memperoleh pengakuan yang sama dengan lulusan sekolah dan dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi di sekolah-sekolah yang dikelola Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk tujuan ini dikeluarkanlah kebijakan berupa Keputusan Bersama Tiga Menteri pada tahun 1974 tentang peningkatan mutu pendidikan pada madrasah.⁴³

Memasuki dekade 90-an kebijakan pemerintah mengenai madrasah ditujukan secara penuh untuk membangun satu sistem pendidikan nasional yang utuh. Dengan satu sistem yang utuh dimaksudkan bahwa pendidikan nasional tidak hanya bergantung pada pendidikan jalur sekolah tetapi juga memanfaatkan jalur luar sekolah. Untuk tujuan ini, pemerintah melakukan langkah konkrit berupa penyusunan Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan sekaligus menggantikan UU No. 4 Tahun 1950 jo. No. 12 Tahun 1954. Dalam konteks ini, penegasan definitif tentang madrasah diberikan melalui keputusan-keputusan yang lebih operasional dan dimasukkan dalam kategori pendidikan sekolah tanpa menghilangkan krakter keagamaannya. Melalui upaya ini dapat dikatakan bahwa madrasah berkembang secara terpadu dalam sistem pendidikan nasional.⁴⁴

⁴²Ainurrafiq Dawam dan Ahmad Ta'arifin, *op. cit.*, h. 46-47.

⁴³Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2009), h. 102-105.

⁴⁴Maksum, *op. cit.*, h. 132-133.

E. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia dalam pertumbuhan dan perkembangannya memadukan dua sistem pendidikan, sistem pesantren dan sistem sekolah modern.
- b. Pertumbuhan madrasah dilatarbelakangi dua faktor, *pertama*, faktor pembaharuan Islam. Terbentuknya madrasah tidak lepas dari gerakan pembaruan Islam yang dimulai oleh santri-santri yang pernah belajar di Timur Tengah. *Kedua* respon terhadap politik pendidikan pemerintah Belanda. Sekolah yang didirikan oleh pemerintah Belanda sebagai alat politik penguasa dan sifatnya diskriminatif serta dikelola secara modern, membuat kalangan intelektual Islam untuk merekonstruksi pendidikan Islam yang lebih maju.
- c. sejak awal hingga sekarang telah hadir berbagai madrasah di hampir seluruh wilayah nusantara. Madrasah-madrasah itu menggunakan sistem yang berbeda dengan pesantren, baik menyangkut sistem belajar-mengajar, materi pelajaran, rencana pembelajaran, waktu belajar maupun guru.
- d. Perkembangan madrasah sebelum dan sesudah kemerdekaan sangat ditentukan kebijakan pihak penguasa. Sebelum kemerdekaan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah penjajah terhadap pendidikan Islam berorientasi pada penguatan kekuasaan di Indonesia. Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia berusaha menata pendidikan madrasah dengan sejumlah peraturan dan undang-undang.

2. Implikasi

- a. Madrasah merupakan lembaga pendidikan alternatif bagi para orang tua untuk menjadi tempat penyelenggaraan pendidikan bagi putra putrinya. Jumlahnya dari satu periode ke periode pemerintahan berikutnya mengalami perkembangan. Oleh karena itu penentu kebijakan dan yang terlibat dalam proses pendidikan di madrasah seyogyanya memperhatikan sistem pembelajaran sebagaimana awal sejarah pembentukannya.
- b. Bagi pemerhati pendidikan Islam, khususnya yang mendalami sejarah pendidikan Islam, penting untuk mengkaji lebih mendalam tentang pembaharuan madrasah. Oleh karena lembaga pendidikan ini tumbuh dan berkembang dalam suasana yang sangat kompleks, baik dalam suasana politik maupun suasana kultural.

KEPUSTAKAAN

- Daulay, Haidar Putra. *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Kencana, 2009.
- Dawan, Ainurrafiq dan Ahmad Ta'arifin. *Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren*. Cet. I; Sapeen: Listafariska Putra, 2004.
- Djamas, Nurhayati. *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pascakemerdekaan*. Cet. I; Raja Grafindo Persada, 2009. h. 121.
- Maksum. *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya*. Cet. II; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Nasir, Ridlwan. *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nata, Abuddin, ed. *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Grasindo, 2001.
- Nizar, Samsul, ed. *Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah sampai Indonesia*. Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2011.
- Noer, Deliar. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1990-1942*. Cet. VI; Jakarta: LP3ES, 1994.
- Saridjo, Marwan. *Pendidikan Islam dari Masa ke Masa*. Cet. I; Jakarta: Yayasan Ngali Aksara, 2010.
- Suminto, Aqib. *Politik Islam Hindia Belanda*. Cet. I; Jakarta: LP3ES, 1984.
- Sunanto, Musrifah. *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Suryanegara, Ahmad Mansur. *Api Sejarah*. Cet. II; Salamadani Pustaka Semesta: Bandung, 2009.